

Strategi Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Riza Khoerul Anam¹, Ery Fajarwaty Priyono²

Universitas Peradaban^{1,2}

Jl. Raya Pagojengan Km.3 Paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Brebes^{1,2}

rizakhoerulanam10@gmail.com¹, evahokiku@gmail.com²

Kata kunci

Strategi
Komunikasi, PPID,
Keterbukaan
Informasi Publik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses strategi komunikasi organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan Teori Strategi Komunikasi Fred R. David dimana terdapat 3 tahapan yakni tahap perumusan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Serta menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles and Hubermen. Adapun hasil penelitian ini, menunjukan bahwa proses strategi komunikasi yang dilakukan PPID Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yakni pada tahapan perumusan strategi melakukan 2 tahap. Pertama PPID melakukan inventarisir informasi publik dan mengadakan Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan mengadakan acara KIP Award. Dalam pelaksanaan strategi dengan melaksanakan kegiatan KIP Award ini dilakukan dalam 4 tahap yakni kegiatan penilaian website, penilaian SAQ, visitasi dan uji publik. Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Brebes terus berupaya melakukan perbaikan, guna terwujudnya pemerintahan yang terbuka, serta saat Komisi Informasi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, Kabupaten Brebes mendapat predikat Kabupaten Menuju Informatif dengan nilai 89,54. Tahapan evaluasi mengadakan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten disetiap tahunnya.

Keywords

Communication
Strategy, PPID,

Abstract

This research aims to find out how the process of organisational communication strategy of the Information Management and

Public Information Disclosure Documentation Officer of Brebes Regency in the implementation of public information disclosure. In achieving the objectives of this research, the author uses descriptive qualitative research methods. Using Fred R. David's Communication Strategy Theory where there are 3 stages, namely the formulation stage, the implementation stage and the evaluation stage. As well as using data collection techniques observation, interviews and documentation. The data obtained was analysed using the Miles and Huberman data analysis technique. The results of this study show that the communication strategy process carried out by PPID Brebes Regency in implementing public information disclosure, namely at the stage of strategy formulation, carries out 2 stages. First, PPID conducts an inventory of public information and holds Money on Public Information Disclosure by holding a KIP Award event. In implementing the strategy by carrying out the KIP Award activity, it is carried out in 4 stages, namely website assessment activities, SAQ assessment, visitation and public testing. In the implementation of Public Information Disclosure, PPID Brebes Regency continues to make improvements, in order to realise an open government, and when the Central Java Information Commission carried out the ranking of Public Information Disclosure in 2023, Brebes Regency received the title of Regency Towards Informative with a score of 89.54. The evaluation stage holds a District Level Coordination Meeting every year.

PENDAHULUAN

Informasi telah menjadi kebutuhan dalam hidup sehari-hari, dalam kehidupan bersosial informasi menjadi sebuah alat untuk mengembangkan sebuah potensi dalam diri seseorang dan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan. Menurut Rosady Ruslan (2001: 90) menjelaskan informasi sebagai fungsi dalam mengurangi ketidakpastian dalam sistem komunikasi pada lembaga atau organisasi. Informasi disini bukan hanya semacam berbagai dengan kandungan arti, namun telah mencakup jasa, barang, sistematika, diawali dari sumbernya hingga pada hasil akhir (Dhimas Samudra dkk 2022).

Kebutuhan informasi akan terpenuhi, jika proses timbal balik informasi (komunikasi) berjalan sebagai halnya mestinya. Komunikasi disini ialah kebutuhan manusia, karena komunikasi untuk pemenuhi manusia terkait data-data, baik kebutuhan sandang ataupun kebutuhan informasi. Indonesia saat ini berada dalam masa terbukanya informasi sebagai bentuk kebebasan, sehingga berhak mendapat informasi merupakan hak-hak bagi setiap orang dan keperluan akan informasi publik tidak dapat dilarang (Febriani and Juliani 2022).

Dalam menyebarkan informasi pada khalayak diperlukan untuk menentukan strategi komunikasi, strategi dapat diartikan sebagai rangkaian gagasan yang berupa tindakan tertentu guna memperoleh maksud organisasi, yang dilaksanakan seluruh orang-orang yang terkait pada organisasi tersebut. Jadi, penting untuk memahami bahwa strategi tidak hanya mencakup elemen perang atau militer, tetapi juga elemen perancangan dan manajemen yang lebih luas. Selain untuk mewujudkan maksud organisasi, komunikasi dalam organisasi juga diperlukan dalam membangun rasa nyaman dalam lingkungan kerja. Searah bersamaan

pertumbuhan era informasi serta informasi yang terbuka, kini informasi sudah selaku keperluan pokok guna setiap individu guna mendapatkan pelayanan serta pengembangan bagi individu dan lingkungan sosialnya (Yuliana 2023). Maka dibentuknya Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang pengharapannya bisa membentuk keterbukaan informasi publik dengan baik, transparan, efektif serta bisa dipertanggungjawabkan.

PPID kepanjangan dari "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi" yang ialah pejabat yang bertugas serta bertanggungjawab pada bidang pembuatan simpanan, dokumentasi, serta ketersediaan serta termasuk pelayanan informasi pada badan publik. Salah satu dasar hukum dalam implementasi PPID terdapat dalam UU No. 14 tahun 2008 berhubungan Keterbukaan Informasi Publik. PPID pada pemerintahan tersusun atas PPID Utama yang berada dibawah naungan Diskominfo serta PPID Pembantu yang tersusun atas semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pemerintah Kabupaten Brebes lewat Peraturan Bupati Brebes No. 024 Tahun 2011 berhubungan Pedoman Pengelolaan Informasi serta Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, serta Surat Keputusan Bupati Brebes No. 550 / 133 Tahun 2017 Berhubungan Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengadakan pengaksesan informasi publik guna pemohon informasi. Berhubungan pada tugas itu, PPID membuat penetapan standart layanan informasi pada lingkungan PPID Kabupaten Brebes bersamaan terdapat Standart Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, dibuat harapan implementasi UU KIP berlangsung keefektifan serta berbagai hak publik terhadap informasi yang berkualitas bisa dengan realita terlengkapi. Dalam implementasinya kedudukan Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik krusial sekali selaku landasan hukum yang berhubungan pada (1) hak setiap Perseorangan guna mendapatkan Informasi; (2) kewajiban Badan Publik mengadakan serta membuat pelayanan permintaan Informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, serta cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat serta terbatas; (4) kewajiban Badan Publik guna membuat pemberahan sistem dokumentasi serta pelayanan Informasi (Syaini 2023).

Layanan informasi atau data PPID Kabupaten Brebes memanfaatkan fasilitas online, yakni fasilitas untuk memberikan pelayanan informasi. Pejabat PPID memanfaatkan aplikasi online berbasis halaman website yakni SIM (Sistem Informasi Manajemen) PPID Kabupaten Brebes, email dan media sosial. Dengan adanya website ini (<https://ppid.brebeskab.go.id/>) masyarakat yang memerlukan kemudahan data yang lebih pada pengaksesan data yang mereka perlukan melewati pemakaian elektronik. Selain membagikan pelayanan dan pemberian informasi atas dasar permintaan, PPID Brebes pula dengan proaktif membagikan layanan informasi bersamaan pengumuman informasi dengan berkala melewati situs resmi PPID Kabupaten Brebes dan situs tersebut menjadi sarana utama pada penyabaran informasi publik pada masyarakat yang tergolong pada kewajiban kategori informasi diadakan dan diumumkan dengan berkala searah pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengadakan pengaksesan informasi publik guna pemohon informasi. Berhubungan pada tugas itu, PPID membuat penetapan standart layanan informasi pada lingkungan PPID Kabupaten Brebes bersamaan terdapat Standart Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, dibuat harapan implementasi UU KIP berlangsung keefektifan serta berbagai hak publik terhadap informasi yang berkualitas bisa dengan realita terlengkap.

Hak atas informasi publik telah menjadi krusial sekali sebab pengadaan ketetapan negara semakin terbuka dan harus diawasi oleh publik, maka pengadaan negara tersebut semakin bisa dibuat pertanggungjawaban. Dalam hal lainnya bermaksud guna menambah kontribusi masyarakat pada setiap ketetapan yang akan diambil pemerintah dan sebagai bentuk transparansi untuk mendorong partisipasi publik dalam rangka membentukkan dan mewujudkan kebaikan penatakelolaan pemerintah. Maka tanggungjawab dan kewajiban PPID selaku pengelola informasi publik dan menjalankan komunikasi organisasi, dibutuhkan adanya strategi komunikasi.

Gambar 1

Rekapitulasi Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yg dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	JANUARI	1	4	1			0	0	0	Terpenuhi
2	FEBRUARI	2	20	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	MARET	4	6	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	MEI	3	16	3	0	1	0	0	0	Terpenuhi
6	JUNI	3	4	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	NOPEMBER	1	8	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	DESEMBER	1	12	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
JUMLAH		15	70	15	0	1	0	0	0	
RATA-RATA		1	6	1	0	0	0	0	0	

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa PPID Kabupaten Brebes serta PPID Pelaksana menerima laporan permohonan informasi publik. Pemohon informasi terdiri dari LSM, pelaku usaha, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang bermaksud mendapat informasi separuh besar guna beberapa tugas kuliah, penelitian dan sebagai bentuk pengawasan bagi pemerintahan. Keterbukaan informasi publik yakni alat dan sarana pada pengoptimalan dan awasan publik pada pengadan negara serta Badan Publik lainnya dan seluurr hal yang berdampak dalam keperluan publik sebagai halnya yang dibuat amanat atas UU KIP pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "Informasi Publik ialah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh sebuah Badan Publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sependapat dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berhubungan dengan kepentingan publik"(Kominfo RI 2010).

[19]

Pejabat PPID bertanggung jawab di bidang, pengimpanan, pengediaan dan layanan informasi. Keterbukaan informasi membuka peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini juga dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, karena pemerintah dan badan publik harus memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Perolehan informasi oleh badan publik pemerintahan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Teori pada penelitian ini ialah strategi komunikasi bersamaan pendekatan manajemen strategi atas Fred R. David. Padangan Fred R. David mengatakan jika manajemen strategi terdapat tiga tahapan dalam sebuah strategi yakni tahap rumusan (*formulation*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap mengevaluasi (*evaluation*) (Fred R. David 2016).

Sebagai halnya dijelaskan diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes serta PPID Utama menjadi pendukung berjalannya fungsi Komisi Informasi dan memiliki peran untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas. Dari penjelasan latar belakang tersebut, terdapat ketertarikan penulisan guna mengetahui strategi komunikasi yang dilangsungkan oleh Pejabat Pengeola Informasi serta Dokumentasi (PPID) Kabupaten Brebes dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Fungsinya ialah untuk membuat pemahaman terkait kejadian yang dialami subjek secara mendalam semacam perilaku, persepsi dengan cara pendeskripsian lewat kata kata. Menurut Moleong (2012:5) penelitian kualitatif ialah penelitian yang memakai latar ilmiah dengan tujuan menjelaskan tragedi yang berlangsung (Moleong 2012). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif, dimana turun langsung kelapangan untuk mencari data berupa kata, gambar perilaku sera kondiri dilapangan. Teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data oleh Miles and Huberman (1984). Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan triangulasi sumber, yang mana artinya sebagai proses atau alat untuk teknik validasi data. Sumber penelitian yakni asalnya observasi, wawancara serta pendokumentasi dilapangan. Sehingga penelitian ini memanfaatkan sumber dimana setelah melangsungkan wawancara serta akan melihat aktivitas yang dilangsungkan dan melihat dokumen-dokumen dari PPID Kabupaten Brebes.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menjabarkan secara definisi atas data-data yang didapatkan dari penelitian dilapangan yang telah dilakukan di PPID Kabupaten Brebes dengan informan penelitian dengan memanfaatkan metode-metode penelitian. Dalam melaksanakan strategi komunikasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kemudian hasil penelitian

[20]

Riza Khoerul Anam, Ery Fajarwaty Priyono
Strategi Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi...

tersebut dikategorikan dalam tahapan-tahapan strategi komunikasi Fred R. David yang terdiri dari 3 tahap yakni:

Perumusan Strategi (*Formulation*)

PPID Kabupaten Brebes dalam melangsungkan sebuah perancangan strategi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, maka dari itu PPID Kabupaten Brebes melangsungkan sebuah perumusan strategi guna menyampaikan informasi publik pada masyarakat. Perumusan strategi ialah hal yang penting dalam tahapan-tahapan awal strategi. Dalam perumusan strategi ini, dalam memeroleh maksud yang diharapkan PPID Kabupaten Brebes melangsungkan berbagai persiapan yang berhubungan pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik,

“Pada perumusan kita melangsungkan inventarisir informasi publik dengan cara mengumpulkan DIP dan DIK masing-masing OPD se-Kabupaten Brebes, melangsungkan monev keterbukaan informasi publik dengan mengadakan KIP Awards. Tahapan KIP Awards ialah penilaian website, penilaian SAQ, visitasi, serta uji publik.” (Hasil Wawancara dengan Rya Rizqi pada 2 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, guna terciptanya Keterbukaan Informasi Publik, PPID melangsungkan monitoring dan evaluasi dengan mengadakan kegiatan KIP Award untuk mendata dan mengumpulkan informasi dari seluruh PPID Pelaksana berdasarkan Self Assessment Questionnaire (SAQ) berserta pedoman pengisian yang nantinya informasi akan masuk kedalam kategori-kategori tertentu.

Implementasi Strategi (*Implementation*)

Perancangan yang matang harus diikuti oleh sebuah pelaksanaan atau tindakan untuk mendukung tercapainya maksud yang telah diperancangkan. PPID selaku pelaksana terus melangsungkan pendekatan dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung keterbukaan informasi publik. PPID melangsungkan berbagai persiapan guna kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Pelaksanaan strategi sepandapat yg sudah diharapkan, tentu saja dengan terus meningkatkan kinerja agar semakin lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan perbaikan akan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya pemerintahan yang terbuka” (Hasil Wawancara dengan Rya Rizqi pada 2 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Brebes telah sepandapat dengan yang diharapkan serta terus berupaya melangsungkan perbaikan, guna terwujudnya pemerintahan yang open government pada Pemerintah Kabupaten Brebes. Pada membuat kemudahan serta kecepatan pembagian layanan informasi, PPID Pelaksana melangsungkan klasifikasi serta dokumentasi informasi publik, PPID Utama melaksanakan kegiatan KIP Award Kabupaten 2023.

Evaluasi Strategi (*Evaluation*)

Dalam menjalankan evaluasi strategi terkait keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Brebes yakni dengan melangsungkan kegiatan Rapat Koordinasi PPID yang dilangsungkan setiap tahunnya. Evaluasi strategi dilangsungkan guna mengerti saat strategi tertentu tidak berlangsung baik. Dalam evaluasi strategi ini, PPID mengundang seluruh elemen terkait dan melangsungkan berbagai persiapan dan strategi guna kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Evaluasi dilangsungkan setiap tahun saat rakor PPID dengan mengundang atasan PPID Pelaksana, penanggung jawab, dan admin PPID Pelaksana”. (Hasil Wawancara dengan Rya Rizqi pada 2 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam pelaksanaan tahapan evaluasi strategi dilangsungkan pada rapat koordinasi PPID yang diadakan setiap tahunnya dimanfaatkan sebagai sebuah capaian bagaimana kinerja yang telah dilangsungkan selama setahun ini dan sebagai tempat membuat inovasi dan gagasan terkait pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

ANALISIS

Pendapat pakar perencangan komunikasi Middleton, mengemukakan strategi komunikasi sebagai kombinasi yang cerdik dan bagus karena seluruh element komunikasi dimana pengirim pesan, isi pesan, media yang dipakai penerima pesan serta efek dari pesan itu yang dibuat dan direncanakan guna memeroleh maksud komunikasi yang baik dan optimal (Zamzami 2021).

Pada hakikatnya strategi ialah sebuah *planning* atau perancangan dan sebuah manajemen dalam mendapatkan sebuah maksud organisasi atau perusahaan. Tetapi, dalam memeroleh maksud organisasi tersebut strategi bukan hanya berfungsi sebagai arah yang menunjukkan jalan saja, melainkan harus bisa menunjukkan bagaimana taktik dalam memeroleh maksud tersebut. Pandangan Onong Uchjana Effendy, strategi komunikasi ialah sebuah panduan dalam perancangan komunikasi “*communication planning*” dengan manajemen komunikasi “*communication management*” dalam memeroleh maksud organisasi yang telah ditentukan. Strategi komunikasi ini wajib dapat menunjukkan bagaimana arah pergerakan secara praktis yang wajib dilangsungkan oleh organisasi, artinya bahwa taktik dan pendekatan (*approach*) yang dimanfaatkan bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi organisasi (Uchjana Effendy 2000).

Analisis Perumusan Strategi (*Formulation*)

Perumusan strategi ialah sebuah upaya dan usaha yang berguna untuk memeroleh maksud yang hendak dicapai, sehingga perumusan strategi disebut sebuah proses yang dimanfaatkan untuk meperencangkan strategi-strategi dalam menentukan seluruh tindakan organisasi. Perumusan strategi ialah dengan pengembangan visi dan misi, membuat identifikasi kesempatan, keuntungan serta ancaman dari luar di sebuah organisasi.

Melihat data-data internal terkait kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memilih strategi khusus guna jangka panjang yang akan dicapai (Fred R. David 2016).

Hasil tahapan ini menjadi sebuah rumusan dan panduan yang nantinya yang akan diimplementasikan oleh PPID dalam memeroleh maksud yang telah ditentukan. Dalam topik ini, yakni strategi komunikasi PPID Kabupaten Brebes pada penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dalam melaksanakan sebuah perumusan strategi, PPID melangsungkan 2 tahapan. Pertama PPID melangsungkan inventarisir informasi publik, dimana PPID mengumpulkan DIP (daftar informasi publik) dan DIK (daftar informasi yang dikecualikan) pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Brebes. Daftar Informasi Publik ialah muatan catatan terkait keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang ada dibawah penguasaan badan publik. Daftar Informasi Publik bisa berguna untuk mempermudah PPID dalam permohonan dan keterbukaan informasi publik. Sedangkan Daftar Informasi yang Dikecualikan ialah daftar informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sependapat amanat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan kedua yakni dengan mengadakan Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan membuat acara bernama KIP Award. Kegiatan KIP Award ini dilaksanakan dalam 4 tahap yakni kegiatan penilaian website, penilaian SAQ, visitasi dan uji publik. PPID Kabupaten Brebes dalam pelaksanakan KIP Award yakni dengan pengumpulan dan pendataan informasi dari masing-masing PPID Pelaksana yang dibuat berdasarkan dari SAQ (Self Assessment Questionnaire) beserta pedoman pengisian. Informasi yang sifatnya terbuka akan dilangsungkan pemilihan bagi informasi yang wajib diadakan dan diberikan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk sebuah Forum Data untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan DIP, evaluasi website dan pengelolaan informasi, serta mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan PPID dengan kegiatan workshop, seminar dan bimtek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Implementasi Pelaksanaan Strategi (*Implementation*)

Pelaksanaan strategi disebut juga "tahap tindakan" dari manajemen strategi. Membuat penerapan dan mengimplementasikan strategi ialah sebuah sistematika dimana strategi dan kebijakan dilaksanakan lewat program-program pembangunan, anggaran serta prosedur. Implementasi ini disebut dengan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan perancangan strategis. Membuat penerapan dan mengimplementasikan strategi bermakna memobilisasi karyawan dan manajer dalam melaksanakan strategi yang telah dibuat menjadi sebuah tindakan. Agar tercapainya maksud, maka diperlukan kedisiplinan, motivasi, kerja keras serta pengorbanan. Strategi yang dirumuskan, namun tidak diimplementasikan tidak akan memeroleh maksud yang berguna (Fred R. David 2016).

PPID melaksanakan kegiatan KIP Award Kabupaten Brebes Tahun 2023 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Hari Jadi Brebes ke 346. Melaksanakan strategi dalam

kaitannya dengan mewujudkan sebuah perumusan strategi yang telah dibuat, PPID Kabupaten Brebes dalam terwujudnya penyelenggaraan terbukanya informasi publik. PPID melaksanakan kegiatan KIP Award ini dilangsungkan dalam 4 tahap yakni kegiatan penilaian website, penilaian SAQ, visitasi dan uji publik. Dalam tahapan penilaian website, dilangsungkan dengan melihat website dari masing-masing OPD satu persatu serta tim penilai dapat dengan bebas menyatakan pendapat agar mendapatkan penilaian yang akurat dan objektif. Selanjutnya tahap penilaian SAQ atau biasa disebut Visitasi SAQ KIP Kabupaten Brebes, dimana PPID melaksanakan visitasi dengan mengunjungi PPID Pelaksana. Tahapan ini telah dilaksanakan pada tanggal 4-13 Juli 2023. Badan Publik atau PPID Pelaksana memiliki kewajiban untuk membuat pengumuman informasi publik, mengadakan informasi publik, melayani permohonan informasi publik dan melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi sependapat bersama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bermaksud untuk memverifikasi atau pemeriksaan kelengkapan data-data informasi yang sebagai halnya telah dinyatakan dalam SAQ dan klarifikasi atas penilaian SAQ.

Tahapan ketiga yakni kegiatan Visitasi Verifikasi Pemerikatan Badan Publik Provinsi Jawa Tengah 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Brebes mendapat nilai sempurna dengan nilai 100. Visitasi Pemerikatan badan Publik ialah rutinan agenda yang dilangsungkan setiap tahunnya guna menilai masing masing badan publik dalam mengumumkan, mengadakan, dan melayani perhonan informasi publik serta dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan menilai pelaksanaan serta patuhnya badan publik dalam layanan publik, sependapat dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan. Pemerikatan Badan Publik berguna sebagai ajang meningkatkan peran masyarakat dalam pengadaan pelayanan informasi publik. Serta mendorong keterbukaan informasi publik dan pengolahan pelayanan informasi publik menjadi lebih baik.

Terakhir ada tahapan Uji Publik KIP Kabupaten tahun 2023. Uji Publik ialah rangkaian dari kegiatan KIP Award, dimana setiap badan publik diminta menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam keterbukaan informasi, pengadaan barang dan jasa serta inovasi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Serta Uji Publik menjadi tempat untuk menilai sejauh mana badan publik di Kabupaten Brebes dalam melaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Kegiatan Uji Publik KIP ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 di Ruang Rapat Sekda Lantai II Gedung KPT Kabupaten Brebes dengan peserta 15 Tim PPID Pelaksana yang lolos dari tahapan visitasi.

Evaluasi Strategi (*Evaluation*)

Evaluasi strategi menjadi tahapan terakhir dalam sebuah strategi. Evaluasi strategi ialah rangkaian kegiatan final dalam sebuah strategi komunikasi dimana berhubungan dengan keberhasilan yang dicapai setelah implementasi strategi dilaksanakan (Fred R. David 2016). Evaluasi strategi ini menjadi sarana dan tempat untuk mendapatkan informasi terkait

berjalannya sebuah strategi. Strategi diperumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan sukses akan menjadi usang ketika terjadi perubahan dalam lingkup internal dan ekternal organisasi. Maka, pentingnya evaluasi untuk meninjau, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan strategi.

Evaluasi yang dilangsungkan oleh PPID Kabupaten Brebes yang dilangsungkan setiap tahunnya yakni kegiatan evaluasi yang bernama Rapat Koordinasi PPID Tahun 2023 Tingkat Kabupaten, dimana PPID mengundang atasan PPID Pelaksana, Penanggung jawab dan admin-admin PPID Pelaksana. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan terakhir pada tanggal 2 November 2023 yang bertempat di Aula Lt.5 Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Rapat Koordinasi Tahun 2023 ini ialah rangkaian kegiatan dan tindak lanjut untuk mendorong penguatan dan meningkatkan transparansi, akses informasi.

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Brebes seringkali mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yakni permohonan informasi yang tidak lengkap yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diproses langsung serta petugas informasi kesulitan dalam melangsungkan pengecekan dan memproses data jawaban informasi yang diminta dan pada permintaan informasi masuk, pemohon tidak melengkapi data-data legalitas dalam form permohonan informasi.

Evaluasi strategi dibutuhkan dan penting dilangsungkan untuk melangsungkan penilaian terkait kinerja organisasi. Adanya evaluasi sebagai kontrol organisasi untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja dalam memeroleh maksud. Fungsi PPID salah satunya ialah melangsungkan evaluasi terhadap keterbukaan informasi Badan Publik OPD/PPID Pelaksana, berdasarkan standar layanan informasi publik pada membagikan kemudahan serta kecepatan pembagian layanan informasi pada masyarakat.

PENUTUP

Berlandaskan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan mengenai strategi komunikasi PPID dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dalam penelitian ini memanfaatkan strategi komunikasi Fred R. David, dimana terdapat 3 tahapan berupa perumusan strategi, pelaksanaan strategi serta evaluasi strategi (Fred R. David 2016).

PPID Kabupaten Brebes PPID pada tahapan perumusan strategi melangsungkan 2 tahapan. Pertama PPID melangsungkan inventarisir informasi publik, dimana PPID mengumpulkan daftar informasi yang akan disebarluaskan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Brebes. Tahapan kedua yakni dengan mengadakan Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan membuat acara bernama KIP Award. Kegiatan KIP Award ini dilaksanakan dalam 4 tahap yakni kegiatan penilaian website, penilaian SAQ, visitasi dan uji publik, guna terlaksananya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Brebes.

PPID Kabupaten Brebes pada tahap pelaksanaan berlangsung dengan baik sependapat dengan apa yang menjadi harapan dalam melaksanakan kegiatan KIP Award ini dilangsungkan dalam 4 tahap yakni kegiatan penilaian website, penilaian SAQ, visitasi dan uji publik. Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Brebes terus

berupaya melangsungkan perbaikan, guna terwujudnya pemerintahan yang terbuka, serta saat Komisi Informasi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, Kabupaten Brebes mendapat predikat Kabupaten Menuju Informatif dengan nilai 89,54.

PPID Kabupaten Brebes pada tahapan evaluasi mengadakan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten disetiap tahunnya, dimana PPID mengundang atasan PPID Pelaksana, Penanggung jawab dan admin-admin PPID Pelaksana. Kegiatan ini menjadi sebuah evaluasi, koordinasi dan laporan baik buruknya pelaksanaan kegiatan yang telah dilangsungkan, perumusan yang telah direncakan apakah berjalan dengan efektif atau tidak, tercapai atau tidak maksud-maksudnya dan memunculkan inovasi-inovasi yang akan dimanfaatkan setiap tahunnya agar masyarakat bisa dengan kemudahan serta kecepatan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhimas Samudra, Danang Fiorendo, Salahudin Salahudin, and Ifan Taufikurahman. 2022. "Inovasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal Informasi Pemkab Nganjuk (Ping)." *Jurnal Academia Praja* 5 (1): 73–78. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.938>.
- Febriani, Diah Lastri, and Reni Juliani. 2022. "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 19–38. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970>.
- Fred R. David. 2016. *MANAJEMEN STRATEGIK - Suatu Pendekatan Bersaing Edisi 15*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kominfo RI. 2010. *Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP*. Kementerian Kominfo RI. Vol. 2.
- Moleong. 2012. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A. 2000. *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi*.
- Syaini, Masruri. 2023. "Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik (Studi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Bulungan)" 8 (1): 33–40.
- Yuliana, Nina, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, and Interpersonal Communication. 2023. "STRATEGI DISKOMINFO PROVINSI BANTEN SEBAGAI PPID UTAMA DALAM MENINGKATKAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK" 2 (5): 31–40.
- Zamzami, Wili Sahana. 2021. "Strategi Komunikasi Organisasi." *Journal Educational Research and Social Studies* Volume 2 N: 25–37.